

WARTA BASEMENT



KKN Universitas Merdeka Malang: Pengabdian Mandiri dengan Biaya Sendiri



UNIT KEGIATAN PERS MAHASISWA CIVITAS
Basement III Keuangan dan Perbankan
Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Raya Dieng No.57
Telp : 0895397691329
EMAIL : unmercivitas@gmail.com

EDISI
**MARET
2025**

PENGANTAR REDAKSI

SALAM PERS MAHASISWA!

Kuliah Kerja Nyata Universitas Merdeka Malang adalah wadah bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu dan berkontribusi kepada masyarakat. Tahun ini, KKN mengusung tema Penguatan, Pemberdayaan, dan Masyarakat di Kecamatan Wagir Kota Malang.

Berbagai tantangan seperti adaptasi, keterbatasan sumber daya, dan pengelolaan dana mewarnai pelaksanaan KKN kali ini. Oleh karena itu, Warta Basement edisi ini hadir untuk menggambarkan perjalanan yang terjadi dalam KKN tahun ini.

Untuk lebih lengkap, silahkan menjelajah ke tiap halaman Warta Basement edisi ini.

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung : Rektor Universitas Merdeka Malang. **Penanggung Jawab** : Pimpinan Umum UKPM. **Pembina** : H. Rochmad Effendi B.H.Sc.M.si. **Pemimpin Umum** : Ilham Budi Raharja. **Pimpinan Redaksi** : Nova Velinda Fitri. **Redaksi Pelaksana** : Fian Wahyu Firmansyah. **Editor** : Wika Aldhamayanti, Arvin Ma'ruf . **Sirkulasi** : Redaksi WB. **Layout** : Muhamad Argi Ferdiansyah, Mochamad Naufal Dava Raffialy. **Redaksi** : Rayhan Arsyadillah R, Dea Ramadhani, Pungkas Raihansyah, Caecilia Pelita Andini, Nabila Putri Larasati, Khairul, Maikel Zanambani, Agatha Octavianny Callista, Firdaus Surur Zamzamiyatna, Muhammad Daffa Nugraha, Faiz Afdhal, Nanda Ainun Najwa, Najma Awalia Rizkia F, Misael Petra, Astrit Carmelia Tonis, Novia Rahmawati, Hayunaji Haristya Muhammah, Ahmad Mulya Saputra, Khotimatul Maulidah, Kevin Khayla, Shelomita, Hendi Rela, Maharani Aisyah, Reina, Antonia, Auliya, Gabriela, Luluk

02

**Pengantar
& Redaksi**

04

Artikel Utama

10

Artikel Lepas

15

Resensi Buku

20

Konten Lain

03

Daftar Isi

05

Fokus

14

Opini

16

Sastrra

Muda Mengabdi, Desa Berdaya

Kuliah Kerja Nyata Universitas Merdeka Malang merupakan program akademik yang menggabungkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan penerapan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama perkuliahan. Serta tema dalam KKN yang diambil tahun ini yaitu Penguatan, Pemberdayaan, dan Masyarakat. Program ini bertujuan memberikan pengalaman langsung dalam memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pada pelaksanaan kali ini, KKN Unmer mengambil lokasi di seluruh Kecamatan Wagir, yang sebelumnya bertepatan pada daerah Kecamatan Sukun Kota Malang. Pemilihan lokasi KKN di Kecamatan Wagir ini pastinya memiliki tujuan yang dimana tidak hanya pada desa saja yang memiliki permasalahan, namun pastinya kota juga memiliki masalah seperti kesenjangan sosial.

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini berlangsung selama satu bulan penuh, dimulai dari 28 Januari hingga 28 Februari 2025, sesuai dengan kalender akademik. Persyaratan utama bagi mahasiswa yang ingin mengikuti KKN yaitu telah menempuh minimal 100 SKS, yang umumnya dicapai pada semester 5 atau 6. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh fakultas agar mahasiswa memiliki landasan akademik yang kuat serta kesiapan mental dalam menghadapi tantangan di lapangan.

Lokasi KKN ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak maksimal 15 km atau waktu tempuh sekitar 30 menit dari kampus menggunakan sepeda motor. Maka dari itu, sesuai kebijakan pihak universitas dalam pelaksanaannya mahasiswa tidak diperbolehkan menetap di desa, akan tetapi harus aktif berinteraksi dengan warga untuk mengidentifikasi permasalahan serta berkontribusi dalam mencari solusi.

Dalam hal ini mahasiswa ditempatkan di berbagai tempat di Kecamatan Wagir dengan kelompok yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Dalam setiap pembagian kelompok tersebut terdiri dari 40 mahasiswa dengan dibagi menjadi dua kelompok besar, setiap kelompok terdiri dari 20 mahasiswa yang sudah didampingi oleh Dosen Pendamping Lapang (DPL). Kemudian setiap kelompok bertanggung jawab merancang dan menjalankan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Setiap kelompok KKN yang telah dibagi menjadi dua kelompok besar akan menerima dana yang telah ditetapkan oleh pihak kampus.

Dana tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat mencukupi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan program kerja yang telah dirancang selama satu bulan penuh. Rangkaian kegiatan yang harus didukung oleh dana tersebut mencakup acara pembukaan, proses pelaksanaan berbagai program kerja sesuai dengan rencana yang telah disusun, serta kegiatan penutupan. Selain itu, dana tersebut juga harus dapat menunjang terselenggaranya Entrepreneur Day sebagai bagian dari rangkaian program KKN. Oleh karena itu, setiap kelompok diharapkan mampu mengelola anggaran yang diberikan secara efektif dan efisien agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Namun, apakah dana yang telah ditetapkan benar-benar cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan program kerja yang dirancang? Mampukah anggaran tersebut membayai setiap tahap kegiatan selama satu bulan penuh, mulai dari pembukaan, pelaksanaan program, hingga Entrepreneur Day?

Penulis : Nova

Pelaksanaan KKN Universitas Merdeka Malang

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Merdeka (UNMER) Malang dilaksanakan pada bulan Februari 2025 di seluruh desa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

Kepala Bidang Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UNMER Malang Sufiyanto, S.T., M.T., menyampaikan bahwa tema dari KKN ini ialah Penguatan, Pemberdayaan, dan Masyarakat, yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa berkontribusi langsung dengan proyek nyata dan berdampak bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kami memfasilitasi KKN dua kali setahun sesuai kalender akademik. Pelaksanaannya

satu bulan di akhir semester agar tidak mengganggu perkuliahan. Syaratnya, mahasiswa harus menempuh minimal 100 SKS, jadi biasanya diikuti semester 5 atau 6," jelasnya.

Dalam setiap pembagian kelompok dari KKN tersebut terdiri dari 40 mahasiswa dengan dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, setiap kelompok terdiri dari 20 mahasiswa yang sudah didampingi oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL) dan ditempatkan di satu desa atau dusun tertentu di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Pembagian lokasi dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Camat dan kepala desa (Kades) setempat.

Adapun timeline berlangsungnya KKN UNMER 2025 adalah sebagai berikut

Pembukaan KKN di kampus	Kamis, 23 Januari 2025	Gedung rektorat PPI UNMER
Pembukaan KKN di desa	Jumat, 24 Januari 2025	Kantor Desa Pandanlandung
Entrepreneur Day	Kamis, 20 Februari 2025	Rektorat UNMER
Penutupan KKN	Jumat, 28 Februari 2025	Kantor Desa Pandanlandung

Konsep KKN Tematik UNMER: Fokus pada Pengabdian Nyata



Sumber : Arsip Civitas

KKN UNMER dirancang agar mahasiswa tidak sekadar melakukan sosialisasi atau penyuluhan, tetapi menghasilkan program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dalam setiap tim yang terdiri dari 20 mahasiswa mengeluarkan dana yang telah ditentukan untuk merealisasikan satu program kerja utama. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk menulis artikel ilmiah berdasarkan proyek yang mereka jalankan sehingga KKN tidak hanya menjadi pengalaman lapangan, tetapi juga kontribusi akademik.

"Saya tidak ingin KKN hanya sebatas kegiatan seremonial saja, tetapi program harus berbasis kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak nyata," jelas Sufiyanto.

Program Kerja KKN Mahasiswa UNMER Malang

Mahasiswa KKN di Wagir menjalankan berbagai proker berbasis pengembangan desa. Kelompok 6 Tim 2 yang diketuai oleh saudara DG merevitalisasi sumber mata air, membangun green house, serta mengadakan Entrepreneur Day. Kelompok 17 di bawah kepemimpinan PP, membantu pekerja sampah dengan menyediakan perlengkapan operasional, membuat plang informasi sampah, dan mendukung UMKM lokal. Kelompok 10 yang diketuai IL, fokus pada



Sumber : Arsip Civitas

pembangunan green house dan sosialisasi gizi balita. Sementara itu, Kelompok 12 yang diketuai oleh KI merevitalisasi sumber mata air, memperbaiki masjid dan SD, serta membuat rumah nitrasii di masjid sebagai perpustakaan anak-anak.

Peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam kelompok KKN yaitu membimbing mahasiswa dari tahap persiapan hingga laporan akhir, serta membantu mereka mengatasi kendala di lapangan. Menurut Dwi Dian Wigati, S.Pd., M.Pd., salah satu DPL di UNMER Malang, ada salah satu kendala utama dalam pelaksanaan KKN yaitu miskomunikasi antar kelompok yang ditempatkan dalam satu desa. "Permasalahan terbesar itu karena kurangnya komunikasi. Dari masalah kecil akhirnya jadi besar," ujarnya.

Mahasiswa UNMER Tanggung Pendanaan KKN Sendiri

Pendanaan KKN mahasiswa sepenuhnya berasal dari kantong pribadi tanpa subsidi dari kampus, dengan membayar iuran wajib sebesar Rp 300.000 untuk pendaftaran KKN yang ditetapkan oleh pihak kampus dan Rp 300.000 untuk dana program kerja yang dikelola oleh kelompok, sehingga total biaya yang ditanggung setiap mahasiswa mencapai Rp 600.000. Sufiyanto, menjelaskan bahwa iuran ini diperlukan sebagai bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat karena melaksanakan program pengabdian

tidak hanya sekadar berbicara dengan masyarakat, tetapi juga membutuhkan dana untuk konsumsi peserta, backdrop, dokumentasi, atau narasumber dari luar dalam kegiatannya seperti sosialisasi. Dengan jumlah 20 mahasiswa setiap kelompok, total dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp 6.000.000 untuk memenuhi semua kebutuhan selama satu bulan KKN.

Menurut DG ketua Kelompok 6 Tim 2, total dana yang terkumpul dari 20 anggota kelompoknya adalah Rp 6.000.000. Dari jumlah tersebut, Rp 4.000.000 dialokasikan untuk program kerja, Rp 1.000.000 digunakan untuk acara entrepreneur day, dan sisanya dipakai untuk keperluan pembukaan serta penutupan KKN. Sementara itu, KI Ketua Kelompok 12, menjelaskan lebih rinci bahwa kelompoknya yang berjumlah 40 orang yang terdiri dari dua tim mengumpulkan dana Rp 12.000.000 (Rp 6.000.000 per tim). Dari jumlah tersebut, Rp 4.000.000 dialokasikan untuk program kerja utama, sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan tambahan seperti revitalisasi sekolah dan masjid. Menurut Dwi Dian Wigati selaku DPL, dana Rp 6.000.000 setiap kelompok harus mencukupi untuk membayai seluruh program kerja, termasuk pembukaan, penutupan, serta dokumentasi seperti banner dan laporan akhir. Jika dana kurang, mahasiswa harus mencari alternatif lain.

"Dana sebesar 6 juta itu harus cukup untuk semua kebutuhan, mulai dari program kerja, administrasi, sampai laporan ilmiah. Jadi mahasiswa harus pintar mengatur anggaran," jelasnya.

Mahasiswa KKN UNMER Keluhkan Sistem Pendanaan dan Transparansi

Beberapa mahasiswa mengeluhkan kurangnya transparansi mengenai biaya pendaftaran dan dana program kerja. Banyak yang awalnya mengira bahwa Rp 300.000 adalah biaya pendaftaran yang sudah termasuk dana program kerja, akan tetapi mereka harus membayar lagi dan menutup sendiri kekurangan jika ada. Ketua KKN Kelompok 10 B yaitu IL, mengonfirmasi bahwa dana sepenuhnya berasal dari mahasiswa tanpa subsidi.

"Dana KKN ini tergantung kondisi ekonomi masing-masing. Ada yang merasa terbantu karena cukup untuk program kerja, tapi ada juga yang merasa terbebani," ujarnya.

Ketua Kelompok 6 Tim 2 yaitu DG, yang menyebutkan bahwa sistem ini sempat membingungkan mahasiswa karena mereka mengira biaya pendaftaran sudah mencakup dana program kerja. KKN UNMER ini berlangsung selama satu bulan di beberapa desa, seperti Pandanlandung, Dali Sodo, Pandanrejo, dan Jedong Wagir. Program kerja yang dijalankan meliputi revitalisasi mata air, pembangunan green house, sosialisasi gizi balita, serta dukungan terhadap UMKM. Ketua Kelompok 10 B yaitu IL, menambahkan bahwa meskipun dana yang terkumpul cukup untuk merealisasikan program kerja, beberapa mahasiswa merasa terbebani tergantung pada kondisi ekonomi masing-masing karena untuk menjalakan program-progam di masing-masing kelompok tidaklah membutuhkan dana yang sedikit.

Selain beban finansial, mahasiswa juga mengeluhkan kurangnya transparansi dari pihak kampus, terutama terkait dengan BPJS. PP, Ketua Kelompok 17 menyoroti bahwa mahasiswa diwajibkan membayar biaya BPJS, tetapi hingga akhir KKN, mereka tidak mengetahui cara mengklaimnya. Bahkan, dalam beberapa kasus mahasiswa yang sakit harus membeli obat sendiri tanpa bisa manfaatkan BPJS tersebut.

Meski menghadapi berbagai kendala, mahasiswa tetap berupaya menjalankan program kerja dengan baik dan mengatur anggaran agar dapat mencukupi kebutuhan. Tantangan lain yang mereka hadapi meliputi cuaca yang tidak menentu serta kesulitan dalam menyatukan anggota kelompok yang berasal dari berbagai fakultas.

Mahasiswa berharap di masa mendatang pihak kampus dapat memberikan transparansi lebih jelas mengenai penggunaan dana KKN serta mempertimbangkan dukungan finansial. Selain itu, kebijakan BPJS juga diharapkan lebih jelas dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan perbaikan sistem, KKN diharapkan dapat berjalan lebih efektif tanpa membebani mahasiswa secara finansial. Mahasiswa berharap sistem KKN diperbaiki, terutama dalam hal pendanaan dan transparansi. Mereka menyoroti perlunya kejelasan soal dana pendaftaran dan BPJS, fleksibilitas penggunaan dana proker tanpa aturan ketat dari LPPM, serta subsidi bagi mahasiswa yang kesulitan finansial.

"Harapan ke depannya lebih transparan aja soal dana pendaftaran, biar jelas Rp 300.000 itu buat apa," ujar Kl.

Penulis : Fian

KKN KECAMATAN WAGIR

UNMER 2025



Illustrator : Nova

PUKUL MUNDUR TNI KE BARAK



Sumber : Arsip Civitas

Kamis (20/03/2025) di tengah-tengah kota Malang, telah terlaksana aksi “Tolak RUU TNI”. Aksi ini diprakarsai oleh AksiKamisanMalang dan Aliansi Suara Rakdjab (ASURO) yang merupakan respon atas rencana pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Akan tetapi, sayangnya sekitar pukul 10.00 WIB di hari yang sama, Puan Maharani melalui rapat paripurna resmi mengetuk palu pengesahan RUU TNI menjadi Undang-Undang.

Aksi tersebut selain menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI, kawan-kawan demonstran juga menyuarakan kembali isu kanjuruhan yang tidak memperlihatkan adanya keadilan, meminta diselesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi, mempertanyakan kejelasan RUU masyarakat adat dan PPRT, dan menuntut pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua Barat.

Malang bukanlah satu-satunya kota yang menggelar aksi “Tolak RUU TNI”. Menurut @aksikamisan dalam postingan Instagram resminya tercatat sekitar delapan belas kota di seluruh Indonesia menyelenggarakan aksi yang sama secara serentak. Mengapa begitu ramai orang khawatir dengan dampak disahkannya RUU TNI ini?

Setidaknya terdapat empat pasal yang bermasalah pada RUU TNI tersebut, yaitu Pasal 3, Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53. Melalui RUU tersebut, kedudukan TNI menjadi diistimewakan karena di bawah Kementerian Pertahanan, prajurit TNI dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga, Kejaksaan RI, sekaligus mengatur batas usia pensiun prajurit. Selain pasal yang bermasalah, perjalanan RUU TNI menjadi Undang-Undang juga sangat menggelitik. Pasalnya DPR RI sempat membahas UU tersebut secara tertutup di hotel Fairmont, sebuah hotel mewah di ibukota, yang tidak selaras dengan

POIN-POIN PENTING REVISI UU TNI

RUU TNI mengubah sejumlah pasal menyangkut tugas dan kewenangan pokok TNI. Di antaranya perluasan jabatan sipil yang bisa ditempati TNI aktif dan penambahan usia pensiun.

Pasal 7

Operasi militer selain perang atau OMSP

RUU TNI menambah dua kewenangan TNI dalam OMSP dari semula 14 item menjadi 16.

Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber

Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri

Pasal 47

Prajurit aktif di instansi sipil



RUU TNI menambah lima instansi yang bisa diduduki prajurit aktif, sehingga jumlahnya jadi 14 dari sebelumnya hanya 9.

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional
3. Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden
4. Badan Intelijen Negara
5. Badan Siber dan/atau Sandi Negara
6. Lembaga Ketahanan Nasional
7. Badan Search And Rescue (SAR) Nasional
8. Badan Narkotika Nasional
9. Mahkamah Agung
10. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
11. Badan Penanggulangan Bencana
12. Badan Penanggulangan Terorisme
13. Badan Keamanan Laut
14. Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer)

Pasal 53

Batas usia pensiun



RUU TNI mengubah batas usia pensiun menjadi tiga klaster antara tamtama dan bintara, perwira menengah, dan jenderal atau perwira tinggi.

- Bintara dan tamtama: 55 tahun
- Perwira sampai dengan pangkat kolonel: 58 tahun
- Perwira tinggi bintang 1: 60 tahun
- Perwira tinggi bintang 2: 61 tahun
- Perwira tinggi bintang 3: 62 tahun
- Perwira tinggi bintang 4: 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 tahun sesuai keputusan presiden

kebijakan efisiensi yang digaungkan pemerintah akhir-akhir ini sekaligus melanggar asas keterbukaan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sikap DPR RI yang mengutamakan RUU TNI dibandingkan Rancangan Undang-Undang lain yang lebih penting patut dipertanyakan. RUU TNI tidak masuk pada daftar 41 RUU Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2025 yang telah ditetapkan 19 November 2024. Namun setelah dikeluarkannya Surat Presiden No. R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 dan menurut hasil rapat paripurna 18 Februari 2025, RUU TNI masuk dalam daftar prolegnas prioritas

Terburu-buru dan tertutup sangat wajar mengapa masyarakat mempertanyakan urgensi dari disahkannya UU ini.

Masyarakat juga berpendapat bahwa negara sedang menggelar karpet merah untuk "melegalkan" dwifungsi TNI yang telah dimatikan dua puluh tujuh tahun yang lalu ketika reformasi. "Melegalkan" karena sesungguhnya saat ini terdapat beberapa prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil, diantaranya; Letkol Inf Teddy Indra Wijaya (Seskab), Mayjen TNI Maryono (Irjen Kemenhub), Mayjen TNI Irham Waroohan (Irjen Kementerian), Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan (Badan Penyelenggara Haji), Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya (Dirut Perum Bulog). Nama-nama tersebut sekarang menduduki jabatannya dengan tidak terlebih dahulu mengundurkan diri dari militer. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Pasal 47 ayat 2 memang mengizinkan prajurit aktif TNI menduduki jabatan sipil, namun nama-nama tersebut hingga saat ini menduduki jabatannya dengan melanggar peraturan tersebut.

Pengkhianatan kepada reformasi dan pemerintah yang otoriter sungguh membuat rakyat marah, sehingga aksi penolakan di berbagai kota pada tanggal 20 Maret 2025 lalu sangat wajar terjadi. "UU TNI POLRI ini akan mengakibatkan kemunculan konsep otoriter orde baru yang akan diperaktekan di abad 21, kenapa? karena pemerintah sendiri sebagian besar pejabat publik diambil oleh militer dan eks militer setelah diambil oleh eks eks militer ini kemudian dibentuk suatu RUU yang mengiyakan segala bentuk kebijakan militer, bagi kami ini adalah persekongkolan secara terstruktur dalam bentuk negara" berikut yang disampaikan bung Jeko saat Aksi Kamisan, 20 Maret lalu. Masuknya militer dalam ranah sipil sangat mengkhawatirkan mengingat Indonesia adalah negara demokrasi. Krisis lapangan pekerjaan saat ini akan semakin parah apabila militer masuk ranah sipil.

Di sisi lain, terdapat argumen menarik dari Rizki Aulia R. Natakusumah, perwakilan fraksi Partai Demokrat pada rapat kerja Komisi I DPR RI Selasa (18/03/2025) lalu mengenai hal-hal kontroversial pada Revisi UU TNI. Pertama, mengenai penambahan jumlah jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI aktif bahwa jabatan-jabatan yang akan diemban tersebut harus sesuai dengan aspek pertahanan negara. Kedua, terkait penambahan ketentuan dalam Operasi Militer Selain Perang bahwa dalam peraturan tersebut harus didefinisikan secara jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan lain yang bertanggung jawab dengan bidang tersebut. Ketiga, tentang perubahan ketentuan usia pensiun prajurit TNI bahwa ketentuan tersebut harus diikuti dengan adanya batasan yang jelas dan spesifikasi yang ketat.

"Setelah lebih dari dua dekade, dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, serta tantangan keamanan nasional telah berubah secara signifikan. Oleh karenanya, revisi

terhadap Undang-Undang TNI menjadi sebuah kebutuhan untuk memastikan bahwa peran, fungsi, dan struktur organisasi TNI tetap relevan dengan kondisi zaman tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan reformasi yang telah diperjuangkan." berikut dasar argumen yang dilontarkan Rizki pada raker tersebut.

Saat ini, Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah resmi disahkan. Belum genap sehari, tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait revisi UU tersebut. Mereka menggugat RUU TNI karena dinilai terdapat kecacatan prosedural dalam pembentukannya.

Kesimpulannya, adanya Revisi Undang-Undang TNI dan telah disahkannya menjadi Undang-Undang membawa kekhawatiran dan sangat berdampak bagi negeri ini. Dwifungsi TNI dengan embel-embel meningkatkan peran TNI harus benar-benar diwaspadai agar reformasi yang telah diperjuangkan dengan berdarah-darah tidak sia-sia, demokrasi dan supremasi sipil tetap menjadi prioritas.

Penulis : Ilham B. Raharja, Arvin Ma'ruf

Sumber:

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj4npvqdq78o>
<https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-ruu-tni-disahkan-walau-tuai-penolakan--1222777>
<https://www.antikorupsi.org/d/polemik-revisi-uu-tni-sudah-saatnya-pembahasan-uu-semburyi-semburyi-dihentikan>
<https://www.tempo.co/ekonomi/sederet-perwira-tni-aktif-yang-duduki-jabatan-sipil-di-kementerian-dan-bumn-1222235>
<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/ruu-tni-masih-memberi-ruang-kembalinya-dwi-fungsi-tni-dan-militerisme/03/2025/>
<https://fahum.umsu.ac.id/berita/ruu-tni-disahkan-ini-dampak-yang-akan-terjadi/>

Kontroversi RUU TNI: Di Antara Keamanan Nasional dan Hak Asasi Manusia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 20/03/2025 lalu telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) No 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU) yang menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Revisi UU TNI tidak lepas dari kontroversi di kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan poin-poin utama yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang TNI yang telah disahkan menjadi Undang-Undang ini dianggap berpotensi mengaburkan batasan peran militer dalam kehidupan sipil, serta menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya dwifungsi ABRI seperti yang terjadi pada Tahun 1982 silam.

Selain itu, terdapat faktor lain yang menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, yaitu mengapa Rancangan Undang-Undang ini dibahas secara tertutup hingga dilakukan secara tersembunyi. Tujuan dari langkah ini masih dipertanyakan, apakah agar tidak diketahui oleh masyarakat ataupun agar tidak menimbulkan penolakan jika diketahui oleh masyarakat akan menghambat berlangsungnya rapat mengenai pembahasan RUU tersebut. Dikarenakan dalam draft RUU tersebut terdapat penambahan unsur fungsi TNI yang dinilai berpotensi mengurangi peran dan otoritas lembaga sipil dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Selain itu, mengapa RUU TNI ini dapat dengan sangat mudah dan cepat disahkan oleh DPR, padahal permintaan masyarakat kepada DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset hingga saat ini masih belum dikabulkan, padahal sejatinya RUU perampasan aset ini telah diajukan ke DPR sejak tahun 2012 lalu namun pada tahun 2021 Badan Legislasi DPR menghapus RUU ini dari daftar Prolegnas lalu pada tahun 2022 RUU ini kembali diajukan dan masuk Prolegnas prioritas di tahun 2023.

Hal ini diyakini ada kepentingan dari pengusa negara untuk mengembalikan dominasi militer dalam kehidupan masyarakat sipil melalui undang-undang ini, yang berpengaruh terhadap implikasi perubahan terhadap supremasi sipil dan tata kelola pemerintahan demokratis. Mengingat mekanisme pembentukan undang-undang ini telah melanggar nilai-nilai demokrasi di negara ini, bisa jadi kehidupan demokrasi masyarakat secara langsung akan direnggut oleh penguasa, dikarenakan dengan disahkannya Undang-Undang ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini seperti yang terjadi pada masa Orde Baru dahulu yang dimana dengan adanya perluasan otoritas TNI dalam bidang politik dan sosial dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi mengganggu kebebasan Sipil dan Hak Asasi Manusia.

Rasa traumatis pasca peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 1998 mencakup penculikan yang dilakukan secara terstruktur dan terencana hingga penembakan merupakan hal mencekam yang dengan jelas bahwasannya hal ini telah terjadi, jika hal tersebut terulang kembali maka luka lama itu akan kembali tumbuh dan mencederai perjuangan atas kebebasan demokrasi.

Penulis : Faiz

Judul Buku : Laut Bercerita
Penulis : Leila Salikha Chudori
Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia
Tempat diterbitkan : Jakarta, Indonesia
Jumlah Halaman : 379 halaman
Ukuran buku : 20 cm
ISBN 978-602-424-694-5.

SINOPSIS

"Laut Bercerita" mengisahkan perjuangan Biru Laut dan kawan-kawan, sekelompok mahasiswa aktivis yang melawan rezim otoriter demi keadilan. Mereka menghadapi represi brutal—diculik, disiksa, dan banyak yang tak kembali. Leila menggambarkan penderitaan para aktivis serta dampaknya bagi keluarga mereka. Laut perlakan kehilangan harapan, namun tetap teguh pada idealismenya.

KELEBIHAN

Kelebihan novel ini terletak pada narasi emosional yang mengungkap sejarah tersembunyi. Leila tidak sekadar menulis fiksi, tetapi menghidupkan pengalaman korban dengan begitu nyata. Gaya bahasanya yang kuat dan deskriptif membuat pembaca merasakan ketakutan, kesedihan, dan harapan yang terus pupus.



KEKURANGAN

"Laut Bercerita" wajib dibaca bagi yang ingin memahami sejarah kelam Indonesia dan perjuangan aktivis melawan ketidakadilan. Novel ini bukan sekadar mengenang, tetapi juga mengajak terus memperjuangkan kebenaran. Dengan narasi kuat dan emosional, kisahnya menyentuh sekaligus menyakitkan.

Penulis : Daffa

Sastra Civitas

Keyakinan

Karya : Pungkas Raihansyah

Ke pasar pagi membeli mangga

Tak lupa membeli ikan tenggiri

Jika yakin penuh percaya

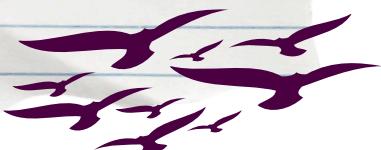
Hidup pasti berjalan berseri

Burung merpati terbang ke dahan

Hinggap sebentar di pohon randu

Jika keyakinan jadi pedoman

Segala rintangan pasti kau temu



Corrup

Karya : Misael Petra Yudha

**Dibalik duka rakyat,
Ada tangan-tangan gelap,
Mereka meraup uang,
Sementara kita memakan nasi.**

**Dengan senyum palsu mereka,
Menipu hati kita semua.
Tapi dimana ada cinta?
Hanya sia-sia saja.**

**Bayangkan jika air sungai,
Jadi penuh sampah plastik
Bagaimana bisa jernih lagi?**

**Dengan demikian Negeri,
Yang perlu bersih dari noda.
Mari kita mulai sekarang,
Sebelum terlambat lagi!**

**Bersama-sama kita harus,
Hari melawan musuh ini besar.
Cinta tanah air,
Dan jadikan lebih baik lagi.**



Hidup

Karya : Faiz Afdhal

**Hidup ini bagikan perjalanan
Penuh dengan liku-liku tak terduga
Terkadang pahit, terkadang manis
Seperti halnya ombak di lautan
yang luas**

**Hidup memberikan pelajaran
Tentang kesabaran dan keuletan
Tentang cobaan yang datang silih
berganti
Namun juga tentang kebahagiaan
yang tiada tara**

**Hidup bukanlah kilas balik
Melainkan perjalanan yang terus
berlanjut
Dengan segala kejutannya
Dan kita hanyalah penumpang di
dalamnya**

Dokumentasi KKN



Universitas Merdeka Malang

Tahun 2025

98 VICTIMS

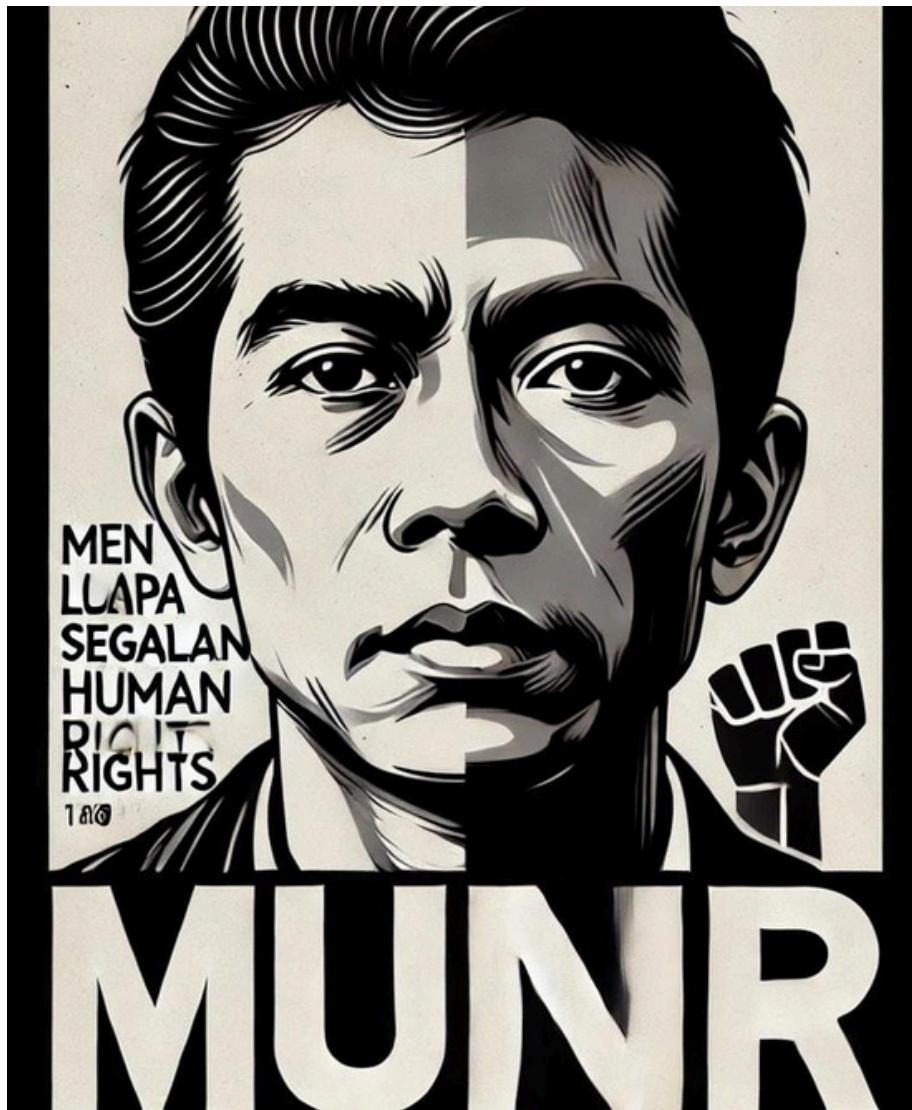
Still seeks justice!



Illustrator : Fian



llustrator : Arvin



Illustrator : Fian

SCAN KODE QR INI



**UNTUK KUNJUNGI
WEBSITE KAMI**



lpmcivitas.wordpress.com

@mediacivitas 